

EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Muhammad Fazly Mawla

NPP. 32.0698

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: 32.0698@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Mulyadi, SP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problem that arises in this study is that gap by conducting an in-depth evaluation of SPBE in the Pontianak City Government and providing data-driven recommendations to enhance the effectiveness of its implementation. **Purpose:** This study aims to evaluate the SPBE maturity level within the Pontianak City Government. **Method:** This research employs a descriptive quantitative approach with data collection techniques through literature questionnaires and interviews. The SPBE maturity evaluation refers to Regulation of the minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 59 of 2020, which consist of four domain: internal policies, governance, SPBE management, and SPBE services. The analysis is conducted by comparing the actual evaluation results with the maturity indicators defined in the regulation. **Result:** the results indicate that the index score for Domain 1 (SPBE Policy) is 3,60 with a VERY GOOD rating, the index score for Domain 2 (SPBE Governance) is 3,40 with a GOOD rating, the index score for Domain 3 (SPBE Management) is 1,73 with a POOR rating, and the index score for Domain 4 (SPBE Services) is 4,14 with a VERY GOOD rating. The overall SPBE maturity level in the Pontianak City Government is 3,49 with a GOOD rating, meaning most SPBE processes are documented but not yet implemented consistently. **Conclusion:** the dominant influencing factors include suboptimal internal policy implementation and the lack of integration across digital services. The recommendations include developing more comprehensive internal policies, enchaning service integration, and strengthening human capacity. These improvements are expected to help the Pontianak City Government achieve a higher SPBE maturity level to support more effective and efficient digital governance.

Keywords: SPBE, Evaluation, Maturity Level, Digital Transformation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak secara mendalam dan memberikan rekomendasi berbasis data guna meningkatkan efektivitas implementasinya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.

Evaluasi tingkat kematangan SPBE mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, yang terdiri dari empat domain utama yaitu, kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi aktual terhadap indikator kematangan yang diterapkan dalam regulasi tersebut. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks Domain 1 (Kebijakan SPBE) adalah 3,60 dengan predikat SANGAT BAIK, nilai indeks Domain 2 (Tata Kelola SPBE) adalah 3,40 dengan predikat BAIK, nilai indeks Domain 3 (Manajemen SPBE) adalah 1,73 dengan predikat KURANG, dan nilai indeks Domain 4 (Layanan SPBE) adalah 4,14 dengan predikat SANGAT BAIK, serta tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak adalah 3,49 dengan predikat BAIK, yang berarti sebagian besar proses SPBE telah terdokumentasi namun belum dilaksanakan secara konsisten. **Kesimpulan:** Faktor domain yang memengaruhi adalah belum optimalnya penerapan kebijakan internal dan belum terintegrasinya seluruh layanan digital. Rekomendasi yang diberikan meliputi penyusunan kebijakan internal yang lebih komprehensif, peningkatan integrasi layanan, serta penguatan kapasitas SDM. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Pontianak dapat mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien.

Kata kunci: SPBE, Evaluasi, Tingkat Kematangan, Transformasi Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh percepatan arus informasi dan pertukaran data lintas batas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi elemen utama dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pemerintahan (Madjid dkk., 2024). Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang sangat pesat dan signifikan. Inovasi digital yang terus bermunculan memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses informasi, efisiensi waktu, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap sistem pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi menjadi semakin besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi pemerintahan untuk bertransformasi mengikuti perkembangan zaman melalui pemanfaatan TIK secara optimal (Purnomo, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi menjadi sarana utama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan dituntut untuk terus berinovasi agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat modern yang serba cepat dan berbasis data digital (Yusriadi & Farida, 2019:17). Kondisi ini juga diperkuat dengan munculnya masyarakat informasi yang semakin aktif dalam memanfaatkan TIK sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari (Rogers, 2003).

Perubahan gaya hidup masyarakat menuju pola yang lebih digital dan informasi-sentris juga turut mempercepat tuntutan transformasi digital di sektor publik. Menurut Rogers

(2003), masyarakat informasi merupakan komunitas sosial yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama, di mana perilaku masyarakat semakin aktif dalam mengakses, memanfaatkan, dan menyebarkan informasi melalui media digital. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen sekaligus distributor informasi. Gaya hidup digital ini mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal guna memenuhi ekspektasi masyarakat modern (Ariantika et al., 2022).

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik tidak bisa lagi bekerja dengan sistem manual atau konvensional yang lamban, tidak efisien, dan tertutup. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespon perubahan tersebut dengan mengadopsi teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Yayat (2017), pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Wulandari et al., 2021).

Komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik tercermin dalam terbitnya berbagai kebijakan strategis. Salah satu di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. Kebijakan ini memberikan arah bagi lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, visi Indonesia sebagai Negara Digital 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2022, menunjukkan bahwa digitalisasi birokrasi bukan sekadar opsi, melainkan keharusan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsive (Nurdiansyah & Hendayun, 2022).

Salah satu implementasi nyata dari transformasi digital pemerintahan di Indonesia adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Ikhbaluddin, 2021). SPBE merupakan inisiatif strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis teknologi informasi secara terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan instansi pemerintah. SPBE tidak hanya menekankan pada pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga mencakup reformasi proses bisnis, manajemen data, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Saputra et al., 2020).

Implementasi SPBE juga ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kelas dunia yang ditandai dengan sistem pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan terpercaya. Pendekatan SPBE berfokus pada penyederhanaan proses birokrasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, peningkatan kualitas layanan publik, serta transformasi digital menyeluruh dalam aktivitas pemerintahan. Keberhasilan implementasi SPBE sangat bergantung pada sinergi antar lembaga pemerintah, kesiapan infrastruktur digital, serta komitmen dari para pemangku kepentingan dalam mendukung reformasi birokrasi (Bouty et al., 2019).

Dalam pelaksanaan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berperan sebagai koordinator dan pengawas utama. Melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, Kementerian PAN-RB menetapkan pedoman

evaluasi pelaksanaan SPBE yang meliputi empat domain utama, yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan, dengan delapan aspek serta indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Evaluasi SPBE secara berkala menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan SPBE serta sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan (La Adu, 2023).

Hasil evaluasi SPBE menjadi gambaran konkret terhadap kinerja digitalisasi suatu instansi pemerintahan. Contohnya, Pemerintah Kota Pontianak yang pada tahun 2023 memperoleh skor 3,43 dengan predikat “Baik”. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menerapkan SPBE secara konsisten dan terstruktur. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai yang mencerminkan adanya progres positif dalam transformasi digital pemerintahan di kota tersebut. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa terdapat domain yang masih belum optimal, khususnya pada domain Manajemen SPBE dengan nilai rata-rata 2,27. Nilai ini menjadi indikator adanya kelemahan dalam aspek manajemen SPBE seperti penerapan manajemen dan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Lindner & Riehm, 2009).

Permasalahan pada domain Manajemen SPBE mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program digitalisasi pemerintahan. Tanpa manajemen yang kuat, berbagai inovasi teknologi yang telah diterapkan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian akademik yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SPBE, khususnya pada domain manajemen di Pemerintah Kota Pontianak.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian independen terhadap tingkat kematangan implementasi SPBE di Pemerintah Kota Pontianak. Peneliti akan bertindak sebagai asesor eksternal sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB No. 59 Tahun 2020, dengan fokus utama pada domain Manajemen SPBE yang mencakup aspek penerapan manajemen dan pelaksanaan audit TIK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan bukti dokumentasi guna menghasilkan deskripsi tingkat kematangan serta skor indeks SPBE secara objektif dan terukur.

Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi implementasi SPBE Pemerintah Kota Pontianak saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Selain itu, hasil evaluasi ini dapat menjadi rujukan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi transformasi digital pemerintahan ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola pemerintahan digital di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Digital Nation 2024.

Secara keseluruhan, implementasi SPBE yang optimal akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintah Kota Pontianak, evaluasi terhadap domain manajemen SPBE merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah banyak dilakukan berbagai daerah, dengan fokus pada pengukuran tingkat kematangan berdasarkan pedoman Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Namun, mayoritas penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2022) dan (Setiawan Putra et al., 2022), hanya menggunakan metode *self-assessment* atau wawancara tanpa menyertai bukti dokumentasi pendukung yang memadai. Selain itu, beberapa penelitian juga tidak membedakan analisis secara mendalam pada domain-domain SPBE, khususnya domain manajemen yang mencakup aspek penerapan manajemen dan pelaksanaan audit TIK.

Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan berfokus secara khusus pada domain manajemen SPBE, yang dalam evaluasi nasional sering menjadi domain dengan nilai terendah. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui kuesioner serta bukti data dukung, penelitian ini tidak hanya menilai secara numerik, tetapi juga memverifikasi kesesuaian implementasi melalui dokumentasi yang valid. Selain itu, penilaian dilakukan secara sistematis terhadap 11 indikator yang berada dalam domain manajemen SPBE, memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi faktual di Pemerintah Kota Pontianak.

Kesenjangan lainnya terletak pada belum tersedianya studi komprehensif di Kota Pontianak yang membahas perkembangan nilai kematangan SPBE secara longitudinal dan berbasis data pendukung. Meskipun Pemerintah Kota Pontianak mendapat predikat “Sangat Baik” dalam evaluasi nasional terakhir, nilai pada domain manajemen masih berada di bawah rata-rata, yaitu 2,27. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi independent yang mendalam guna memberikan rekomendasi konkret. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi celah metodologis dan empiris, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam mendorong tata kelola digital pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2022) mengenai evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan metode kuantitatif deskriptif berbasis *self-assessment* tanpa melampirkan bukti data dukung. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kematangan SPBE sebesar 2,54 dengan interpretasi predikat “Cukup”, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar proses dan layanan telah mulai terkelola, tetapi belum optimal. Kelemahan utama dari penelitian ini adalah absennya dokumentasi yang memverifikasi capaian indikator.

Selanjutnya, (Setiawan Putra et al., 2022) meneliti domain manajemen SPBE di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kematangan domain manajemen SPBE berada di angka 2,2 “CUKUP”, menandakan bahwa proses manajemen SPBE belum sepenuhnya terdefinisi dan diterapkan secara menyeluruh. Penelitian ini juga belum menyajikan data dukung secara rinci yang dapat memperkuat hasil temuannya.

Penelitian oleh (Anjani, 2023) di Diskominfo Kota Tasikmalaya menekankan pada analisis kapabilitas proses domain manajemen SPBE. Dengan pendekatan kualitatif melalui survei dan wawancara, hasilnya menunjukkan nilai indeks sebesar 2,28 pada tahun 2022. Berbeda dari dua penelitian sebelumnya, penelitian ini telah menyertakan sebagian

dokumentasi sebagai bukti pendukung, meskipun belum lengkap secara menyeluruh. Penelitian ini memberikan gambaran penting bagaimana tantangan manjerial mempengaruhi kematangan SPBE di daerah.

Sementara itu, (Setiawan et al., 2023) melakukan evaluasi implementasi e-Government di Kota Palopo menggunakan E-Government Maturity Model. Penelitian ini memperoleh hasil indeks kematangan sebesar 2,94 dengan predikat “Baik”. Meskipun menggunakan model lama yang tidak mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, penelitian ini memberikan alternatif sudut pandang dalam menilai kemajuan transformasi digital pemerintahan daerah.

Terakhir, (Prassida & Rifky, 2023) melakukan studi pada Pemerintah Kota Balikpapan dan mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 3,11 dengan predikat “Baik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi data dukung. Hasilnya memberikan gambaran bahwa keberhasilan penerapan SPBE sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, integrasi sistem, serta kualitas audit internal yang dilakukan secara berkala.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada focus serta pendekatan implementatif yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya dengan fokus evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Pontianak, khususnya pada domain Manajemen SPBE yang mencakup aspek penerapan manajemen SPBE dan pelaksanaan audit TIK. Dari segi tema, penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya mengkaji SPBE secara menyeluruh pada seluruh domain, seperti penelitian (Dewi et al., 2022) di Kabupaten Gresik dan (Setiawan Putra et al., 2022) di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini membatasi ruang lingkup pada satu domain secara mendalam. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrument kuesioner yang disertai data dukung dokumen resmi, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mayoritas bersifat kualitatif dan tidak menyertakan bukti dukung secara sistematis. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada Model Tingkat Kematangan SPBE sebagaimana diatur dalam Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, sementara Sebagian penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan model evaluasi e-Government lama atau tidak mengacu secara eksplisit pada kerangka regulasi terkini. Konteks kebijakan yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengutamakan konsistensi penerapan evaluasi berbasis regulasi nasional terbaru, termasuk hasil evaluasi SPBE tahun 2023 sebagai landasan evaluatif, yang belum dijadikan acuan dalam penelitian lain. Karakteristik objek penelitian juga menjadi pembeda penting, penelitian ini secara spesifik mengambil satu unit kerja yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai lokus penelitian, dengan memperhatikan peran operasional dan strategis dinas tersebut dalam pengelolaan SPBE. Dari sisi hasil, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang lebih tajam dan terarah dalam mendukung transformasi digital pemerintah daerah melalui evaluasi berbasis bukti yang aktual dan spesifik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak dengan cara mengevaluasi data-data terbaru dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai kematangan domain Manajemen SPBE beserta aspek dan indikator SPBE Pemerintah Kota Pontianak dengan hasil evaluasi terbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena didasarkan pada filosofi positivisme yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka yang objektif (dalam Ardiansyah et al., 2023). Proses penelitian kuantitatif ini bersifat linear, dimulai dari perumusan masalah, kajian literatur, pembentukan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Metode deskriptif dalam konteks kuantitatif dipakai untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, tanpa bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memvalidasi dan menganalisis data yang terkumpul agar menghasilkan gambaran yang akurat tentang tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Pontianak. Pendekatan ini dianggap sesuai karena fenomena yang diteliti bersifat aktual dan membutuhkan representasi numerik untuk evaluasi tingkat kematangan SPBE (Sugiyono, 2017).

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini penting untuk memberikan definisi yang jelas terhadap variabel yang diukur. Variabel terikat yang menjadi fokus pengukuran adalah tingkat kematangan SPBE beserta aspek dan indikatornya di Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan variabel bebasnya adalah data terbaru mengenai penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pengukuran variabel terikat mengacu pada model yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, sementara data variabel bebas diperoleh dari hasil pengumpulan data terbaru sebagai dasar evaluasi (Nabila Septia Warman et al., 2022).

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Pontianak yang berjumlah 31 OPD, termasuk pegawai tetap, pegawai kontrak, dan honorer yang terlibat dalam penerapan SPBE. Sampel penelitian diambil dari populasi tersebut menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak beserta seluruh pegawai di dalamnya. Pendekatan ini dipilih agar hasil evaluasi dapat mewakili kondisi sebenarnya pada unit yang menjadi fokus kajian sesuai standar Peraturan Menteri PAN-RB.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 47 pertanyaan terkait penerapan SPBE, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan SPBE berdasarkan indikator yang telah ditentukan, mulai dari tingkat rintisan hingga optimum. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Selain kuesioner, dokumentasi berupa data sekunder seperti dokumen resmi, peraturan, dan bukti pendukung lainnya juga dikumpulkan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi data hasil kuesioner.

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua metode utama, yaitu kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner diberikan langsung kepada informan yang kompeten dan berhubungan langsung dengan SPBE agar jawaban yang diperoleh akurat dan relevan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berupa dokumen resmi, peraturan, dan bukti fisik yang terkait dengan pelaksanaan SPBE. Penggunaan kedua teknik ini memastikan data yang terkumpul lengkap dan valid untuk analisis selanjutnya.

Analisis data dilakukan dengan menghitung nilai indeks tingkat kematangan pada tiap indikator, kemudian digabungkan menjadi indeks aspek sesuai dengan bobot indikator dan aspek. Nilai indeks aspek tersebut kemudian diolah lebih lanjut untuk mendapatkan indeks domain dengan mempertimbangkan bobot aspek dan domain sesuai pedoman evaluasi SPBE. Proses ini menghasilkan predikat tingkat kematangan pada setiap level, mulai dari rintisan, terkelola, terdefinisi, terpandu, terukur, hingga optimum. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai kondisi kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak beserta rekomendasinya berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif yang valid dan terukur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian Tingkat Kematangan Berdasarkan Indikator

Penulis melakukan penilaian terhadap tingkat kematangan indikator-indikator SPBE di Pemerintah Kota Pontianak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020.

Table 1.
Hasil Kuesioner Penelitian

Nomor Indikator	Nama	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot (%)
Domain 1 : Kebijakan SPBE			
Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	3	1,30
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	3	1,30
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	4	1,30
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3	1,30
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4	1,30
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4	1,30
7	Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4	1,30
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4	1,30
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	1,30
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	3	1,30
Domain 2 : Tata Kelola SPBE			
Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE			
11	Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah	3	2,50

12	Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah	3	2,50
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	4	2,50
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	4	2,50
Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi			
15	Pembangunan Aplikasi SPBE	3	2,50
16	Layanan Pusat Data	4	2,50
17	Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3	2,50
18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3	2,50
Aspek 4 : Penyelenggara SPBE			
19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	4	2,50
20	Kolaborasi Penerapan SPBE	3	2,50
Domain 3 : Manajemen SPBE			
Aspek 5 : Penerapan Manajemen SPBE			
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	1,50
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1,50
23	Penerapan Manajemen Data	3	1,50
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	2	1,50
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	1,50
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	1,50
27	Penerapan Manajemen Perubahan	1	1,50
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	1,50
Aspek 6 : Pelaksanaan Audit TIK			
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1,50
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1,50
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1,50
Domain 4 : Layanan SPBE			
Aspek 7 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			
32	Layanan Perencanaan	4	2,75
33	Layanan Penganggaran	4	2,75
34	Layanan Keuangan	4	2,75
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	2,75
36	Layanan Kepegawaian	4	2,75
37	Layanan Kearsipan Dinamis	4	2,75
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	2,75
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4	2,75
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	2,75
41	Layanan Kinerja Pegawai	4	2,75
Aspek 8 : Layanan Publik Berbasis Elektronik			
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	3,00
43	Layanan Data Terbuka	4	3,00
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	3,00
45	Layanan Publik Sektor 1	5	3,00
46	Layanan Publik Sektor 2	5	3,00
47	Layanan Publik Sektor 3	5	3,00

Sumber: Kuesioner peneliti, 2025

Pada **Tabel 1**, dengan mengevaluasi nilai kematangan dan bobot setiap indikator, organisasi dapat menemukan bidang yang harus ditingkatkan atau diperbaiki guna

meningkatkan dan memperbaiki kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Terutama pada indikator 27, 29, 30 dan 31 yang menandakan penerapan pada indikator tersebut belum terlaksana dengan baik dan maksimal.

3.2. Penilaian Tingkat Kematangan Berdasarkan Aspek

Setelah nilai kematangan indikator-indikator diperoleh, langkah berikutnya untuk menentukan nilai indeks Aspek adalah dengan mengolah nilai kematangan indikator-indikator menggunakan bobot yang ada.

Tabel 2.
Penilaian Aspek 1

Aspek	Nama Aspek		Nilai/Bobot Aspek (%)	
1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI x BI (%)
	1	3	1,30	3,90
	2	3	1,30	3,90
	3	4	1,30	5,20
	4	3	1,30	3,90
	5	4	1,30	5,20
	6	4	1,30	5,20
	7	4	1,30	5,20
	8	4	1,30	5,20
	9	4	1,30	5,20
	10	3	1,30	3,90
	Jumlah (NI x BI)			46,80
	Indeks Aspek 1 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/13 \times 46,80$			3,60

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 3.
Penilaian Aspek 2

Aspek	Nama Aspek		Nilai/Bobot Aspek (%)	
2	Perencanaan Strategis SPBE		10,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)	NI x BI (%)
	11	3	2,50	7,50
	12	3	2,50	7,50
	13	4	2,50	10,00
	14	4	2,50	10,00
	Jumlah (NI x BI)			35,00
	Indeks Aspek 2 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/10 \times 35,00$			3,50

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 4.
Penilaian Aspek 3

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)
	15	3	2,50
	16	4	2,50
	17	3	2,50
	18	3	2,50
Jumlah (NI x BI)			32,50
Indeks Aspek 3 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/10 \times 32,50$			3,25

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 5.
Penilaian Aspek 4

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
4	Penyelenggara SPBE	5,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)
	19	4	2,50
	20	3	2,50
Jumlah (NI x BI)			17,50
Indeks Aspek 4 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/5 \times 17,50$			3,50

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 6.
Penilaian Aspek 5

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%)
	21	2	1,50
	22	2	1,50
	23	3	1,50
	24	2	1,50
	25	2	1,50
	26	2	1,50
	27	1	1,50
	28	2	1,50
Jumlah (NI x BI)			24,00
Indeks Aspek 5 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/12 \times 24,00$			2,00

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 7.
Penilaian Aspek 6

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%) NI x BI (%)
	29	1	1,50 1,50
	30	1	1,50 1,50
	31	1	1,50 1,50
Jumlah (NI x BI)			4,50
Indeks Aspek 6 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/4,5 \times 4,50$			1,00

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 8.
Penilaian Aspek 7

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektornik	27,50	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%) NI x BI (%)
	32	4	2,75 11,00
	33	4	2,75 11,00
	34	4	2,75 11,00
	35	4	2,75 11,00
	36	4	2,75 11,00
	37	4	2,75 11,00
	38	3	2,75 8,25
	39	4	2,75 11,00
	40	4	2,75 11,00
	41	4	2,75 11,00
Jumlah (NI x BI)			107,25
Indeks Aspek 7 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/27,5 \times 107,25$			3,90

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 9.
Penilaian Aspek 8

Aspek	Nama Aspek	Nilai/Bobot Aspek (%)	
8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00	
	Nomor Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	Bobot Indikator (%) NI x BI (%)
	42	4	3,00 12,00
	43	4	3,00 12,00
	44	4	3,00 12,00
	45	5	3,00 15,00
	46	5	3,00 15,00

47	5	3,00	15,00
Jumlah (NI x BI)			81,00
Indeks Aspek 8 SPBE = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ $= 1/18 \times 81,00$			4,50

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Pada **Tabel 2**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 3,60 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK. Pada **Tabel 3**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 3,50 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK. Pada **Tabel 4**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi) diperoleh nilai indeks sebesar 3,25 yang menunjukkan predikat BAIK. Pada **Tabel 5**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 4 (Penyelenggara SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 3,50 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK. Pada **Tabel 6**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 2,00 yang menunjukkan predikat CUKUP. Pada **Tabel 7**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) diperoleh nilai indeks sebesar 1,00 yang menunjukkan predikat KURANG. Pada **Tabel 8**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik) diperoleh nilai indeks sebesar 3,90 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK. Pada **Tabel 9**, setelah dilakukan penilaian pada Aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik) diperoleh nilai indeks sebesar 4,50 yang menunjukkan predikat MEMUASKAN.

3.3. Penilaian Tingkat Kematangan Berdasarkan Domain

Setelah nilai kematangan aspek diperoleh, langkah berikutnya untuk menentukan nilai indeks Domain adalah dengan mengolah nilai kematangan aspek menggunakan bobot yang ada.

Tabel 10.
Penilaian Domain 1

Domain	Nama Domain		Nilai/Bobot Domain (%)	
1	Kebijakan SPBE		13,00	
	Nomor Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA x BA (%)
	1	3,60	13,00	46,80
	Jumlah (NI x BI)			46,80
	Indeks Aspek 1 SPBE = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$ $= 1/13 \times 46,80$			3,60

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 11.
Penilaian Domain 2

Domain	Nama Domain		Nilai/Bobot Domain (%)	
2	Tata Kelola SPBE		25,00	
	Nomor Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA x BA (%)

2	3,50	10,00	35,00
3	3,25	10,00	32,50
4	3,50	5,00	17,50
Jumlah (NI x BI)			85,00
Indeks Aspek 2 SPBE = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$ = $1/25 \times 85,00$			3,40

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 12.
Penilaian Domain 3

Domain	Nama Domain		Nilai/Bobot Domain (%)	
3	Manajemen SPBE		16,50	
	Nomor Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA x BA (%)
	5	2,00	12,00	24,00
	6	1,00	4,50	4,50
Jumlah (NI x BI)			28,50	
Indeks Aspek 3 SPBE = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$ = $1/16,5 \times 28,50$			1,73	

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Tabel 13.
Penilaian Domain 4

Domain	Nama Domain		Nilai/Bobot Domain (%)	
4	Layanan SPBE		45,50	
	Nomor Aspek	Nilai Indeks Aspek	Bobot Aspek (%)	NA x BA (%)
	7	3,90	27,50	107,25
	8	4,50	18,00	81,00
Jumlah (NI x BI)			188,25	
Indeks Aspek 4 SPBE = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$ = $1/45,5 \times 188,25$			4,14	

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Pada **Tabel 10**, setelah dilakukan penilaian pada Domain 1 (Kebijakan SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 3,60 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK. Pada **Tabel 11** dilakukan penilaian pada Domain 2 (Tata Kelola SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 3,40 yang menunjukkan predikat BAIK. Pada **Tabel 12** dilakukan penilaian pada Domain 3 (Manajemen SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 1,73 yang menunjukkan predikat KURANG. Dan pada **Tabel 13** dilakukan penilaian pada Domain 4 (Layanan SPBE) diperoleh nilai indeks sebesar 4,14 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK.

3.4. Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Setelah nilai kematangan domain diperoleh, langkah berikutnya untuk menentukan nilai tingkat kematangan SPBE adalah dengan mengolah nilai indeks domain menggunakan bobot yang ada.

Tabel 14.
Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Nomor Domain	Nilai Indeks Domain	Bobot Domain (%)	ND x BD (%)
1	3,60	13,00	46,80
2	3,40	25,00	85,00
3	1,73	16,50	28,55
4	4,14	45,50	188,37
Jumlah (ND x BD)			348,72
Indeks SPBE = $1/100 \times$ Jumlah (ND x BD) = $1/100 \times 348,72$			3,49

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Pada Tabel 14, setelah nilai indeks domain diolah menggunakan bobot yang ada dihasilkan nilai indeks kematangan SPBE sebesar 3,49 yang menunjukkan predikat SANGAT BAIK.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tata Kelola pemerintahan digital. Penelitian ini berfokus pada tingkat kematangan SPBE secara menyeluruh dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi data dukung yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan tingkat kematangan SPBE dengan predikat SANGAT BAIK dengan nilai indeks kematangan SPBE sebesar 3,49.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Dewi et al., 2022) yang melakukan evaluasi SPBE di Kabupaten Gresik, terdapat kesamaan pendekatan metodologi yakni kuantitatif deskriptif. Namun, hanya mengandalkan *self-assessment* tanpa menyertai data dukung, sehingga Tingkat akurasi dan validitas hasil evaluasinya dapat dipertanyakan. Nilai indeks yang diperoleh dalam penelitian tersebut sebesar 2,54 dengan predikat “cukup” sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian ini, namun penelitian ini memiliki keunggulan dalam penggunaan data dukung sebagai verifikasi hasil evaluasi.

Penelitian (Setiawan Putra et al., 2022) yang mengkaji domain manajemen SPBE di Kota Yogyakarta juga menunjukkan hasil yang serupa, dengan nilai indeks sebesar 2,2. Keduanya sama-sama mengidentifikasi domain manajemen sebagai aspek yang belum optimal, namun penelitian ini melengkapi kekurangan studi tersebut dengan menyertakan dokumentasi pendukung serta analisis indikator per indikator yang lebih terperinci.

Penelitian lain oleh (Anjani, 2023) di Kota Tasikmalaya juga menentukan nilai indeks domain manajemen SPBE sebesar 2,28. Walaupun mendekati hasil dari penelitian ini, penelitian Anjani tidak menyajikan pembahasan menyeluruh terhadap rekomendasi perbaikan, sementara penelitian ini memberikan solusi konkret seperti peningkatan kapasitas SDM dan integrasi layanan digital.

Secara umum, penelitian ini melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi kelengkapan bukti data dukung, ketelitian dalam evaluasi per indikator, hingga pemberian rekomendasi berbasis data terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini

dapat dijadikan rujukan kuat dalam perumusan kebijakan peningkatan implementasi SPBE, khususnya pada domain manajemen di lingkungan pemerintah daerah.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak, khususnya pada domain Manajemen SPBE adalah kurang optimalnya pelaksanaan audit TIK dan dokumentasi proses manajemen yang belum menyeluruh. Meskipun beberapa unit kerja telah memiliki kebijakan internal, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten di seluruh OPD. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai pada indikator pelaksanaan audit dan penerapan manajemen yang sistematis. Selain itu, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi internal secara berkelanjutan turut memperlambat kemajuan penerapan SPBE menuju level kematangan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang mendorong keberhasilan awal implementasi SPBE, seperti komitmen pimpinan daerah dan tersedianya infrastruktur dasar TIK yang cukup merata di OPD. Keberadaan tim coordinator SPBE dan dukungan anggaran yang mulai dialokasikan untuk kegiatan digitalisasi pemerintahan menjadi kekuatan yang dapat terus dikembangkan. Selain itu, partisipasi aktif dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya tata kelola SPBE juga memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran digital ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil evaluasi per indikator, disarankan agar Pemerintah Kota Pontianak memperkuat sistem dokumentasi, pelatihan SDM, serta integrasi data lintas sektor pemerintahan. Peningkatan kualitas audit internal TIK juga perlu dilakukan secara berkala agar proses penilaian tidak hanya bersifat administrative, melainkan substantif. Penerapan sistem pengawasan berbasis digital dan pelibatan unit pengendali mutu SPBE akan sangat membantu dalam mengidentifikasi celah kelemahan secara sistematis. Dengan Langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kematangan SPBE dapat meningkat dalam waktu yang lebih singkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota Pontianak telah meningkat dibandingkan dengan evaluasi yang dilakukan ditahun sebelumnya. Nilai kematangan SPBE tahun sebelumnya adalah 3,43 atau BAIK kini telah menjadi 3,49 atau BAIK. Tingkat kematangan tersebut diperoleh melalui berbagai kegiatan untuk mengumpulkan data, yang dilakukan menggunakan kuesioner serta metode pengumpulan data tambahan lainnya. Kemudian, data-data yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai dengan panduan dan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan domain Manajemen SPBE di Pemerintah Kota Pontianak masih memerlukan berbagai Upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan manajemen secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan belum sepenuhnya optimal dan terstandarisasi sesuai dengan pedoman nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis

untuk memperkuat tata kelola SPBE, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang domain Manajemen SPBE.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. Pertama, data yang digunakan sebagian besar diperoleh melalui kuesioner yang mengandalkan respons subjektif dari para responden, sehingga potensi bias dalam penilaian tidak dapat sepenuhnya dihindari. Kedua, cakupan penelitian terbatas pada Pemerintah Kota Pontianak saja, sehingga hasil temuan mungkin kurang dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Ketiga, penelitian ini hanya mengevaluasi kematangan SPBE pada satu titik waktu tanpa memperhitungkan dinamika perubahan jangka panjang yang mungkin terjadi. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan beberapa aspek pendukung, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan lebih luas, kurang maksimal dilakukan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode campuran dengan data kuantitatif dan kualitatif yang lebih komprehensif serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasilnya lebih representatif dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Pontianak.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D. (2023). Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 59 Tahun 2020. *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 133–140. <https://doi.org/10.37676/jmi.v19i1.3501>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Ariantika, I. K. D. F., Koniyo, Moh. H., & Setiawan, E. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pegawai Menggunakan Kerangka SPBE. *Jambura Journal of Informatics*, 4(2). <https://doi.org/10.37905/jji.v4i2.14294>
- Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). *JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK*, 23(1). <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758>
- Dewi, R. S., Astiarasanti, A. H., & Fahmi, F. Z. (2022). Pemantauan Dan Evaluasi Teknologi Informasi Di Pemerintah Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020. *Journal of Digital Business and Innovation Management*, 1(1), 56–68. <https://doi.org/10.26740/jdbim.v1i1.48676>
- Ikhbaluddin, I. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Empat Desa Di Kecamatan Jatinangor). *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 16–30. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v3i2.2309>
- La Adu, A. (2023). EVALUATION OF SPBE SERVICE MATURITY LEVEL IN CENTRAL MALUKU DISTRICT GOVERNMENT USING SPBE 2020 FRAMEWORK. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 6(1). <https://doi.org/10.33387/jiko.v6i1.5422>
- Lindner, R., & Riehm, U. (2009). Electronic Petitions and Institutional Modernization. International Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspective. *JeDEM - EJournal of EDemocracy and Open Government*, 1(1). <https://doi.org/10.29379/jedem.v1i1.3>
- Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in Digital-Based Public Services in Regional Government of West Java Province. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 48-61. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778>
- Nabila Septia Warman, Syamsir Syamsir, Muhammad Maldini, Over Nurhasanah, Nadya Rahmah Oktariandani, & Iqnur Hafizh Syafikruzi. (2022). Implementasi Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pekanbaru. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*, 1(2). <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.161>
- Nurdiansyah, T., & Hendayun, M. (2022). Analisis dan Penerapan Manajemen Risiko Aplikasi Pemantauan serta Sistem Manajemen Keamanan Informasi menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013. *Science*, 7(1).
- Prassida, G. F., & Rifky, G. M. (2023). Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kota Balikpapan Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020. *Jursima*, 11(2), 257–264. <https://doi.org/10.47024/js.v11i2.575>
- Purnomo, S. J. (2023). Mewujudkan Pelayanan Publik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Peran Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Pada 2018-2023. *Bappenas Working Papers*, 6(1). <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.189>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th Editio). Simon and Schuster.
- Saputra, M. R. Y., Winarno, W. W., Henderi, & Shaddiq, S. (2020). Evaluation of maturity level of the electronic based government system in the department of industry and

- commerce of banjar regency. *Journal of Robotics and Control (JRC)*, 1(5).
<https://doi.org/10.18196/jrc.1532>
- Setiawan, A., Sahlan, M. F. F., & Syam, S. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model. *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, 1(2), 59–66.
<https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1345>
- Setiawan Putra, D., Selo, S., & Fauziati, S. (2022). Evaluasi Domain Manajemen Spbe Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-Rb Nomor 59 Tahun 2020. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 5(1), 54–61.
<https://doi.org/10.33387/jiko.v5i1.4265>
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Umam.,
<https://Medium.Com/>.
- Wulandari, D., Gumilang, S. F. S., & Mulyana, R. (2021). PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE LAYANAN SPBE (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMKAB SUKABUMI. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*, 8(1).
<https://doi.org/10.33330/jurteks.v8i1.1204>
- Yusriadi, Y., & Farida, U. (2019). Bureaucracy Performance in Public Services in Indonesia. *Jurnal Ad'ministrare*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.26858/ja.v6i1.9434>

